

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai tata kelola pasar tradisional telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Namun, guna menunjukkan posisi akademik dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini, penulis melakukan analisis mendalam terhadap sepuluh penelitian relevan. Analisis ini bertujuan untuk memetakan keterkaitan serta perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Among Tani Kota Batu. Adapun analisis poin demi poin terhadap sepuluh literatur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap (Davies et al., 2022): Studi ini menyoroti tata kelola pasar tradisional dalam sistem pangan perkotaan-pedesaan. Relevansi penelitian ini terletak pada pemahaman mengenai rantai distribusi dan pentingnya pasar bagi ketahanan pangan. Perbedaannya, penelitian penulis lebih memfokuskan pada aspek sosiologis relasi kekuasaan antara pengelola dan pedagang di tingkat lokal melalui kerangka Local Social Governance (LSG).
2. Analisis terhadap (Fernando et al., 2021): Penelitian ini membahas manajemen ruang publik berbasis warga sebagai bentuk manajemen komunitas-publik yang baru. Penulis menggunakan studi ini sebagai pembanding dalam melihat potensi partisipasi warga. Perbedaannya, penelitian penulis secara spesifik menguji indikator KKNG dalam ruang pasar untuk melihat apakah pola manajemen tersebut benar-benar komunikatif atau masih bersifat birokratis.
3. Analisis terhadap (Utari et al., 2021): Studi ini menganalisis keberlanjutan pasar dari perspektif manajer pasar (top-down). Penelitian penulis melakukan dekonstruksi terhadap pandangan tersebut dengan menghadirkan perspektif dari sisi pedagang, guna melihat sejauh mana kebijakan manajer pasar diakomodasi atau justru mendistorsi kepentingan pedagang.
4. Analisis terhadap (Ogunnubi, 2022): Fokus pada tata kelola lokal sebagai sistem kolaboratif yang melibatkan interaksi institusi formal dan informal. Relevansi penelitian ini sangat kuat dengan konsep LSG yang penulis gunakan.

Namun, penelitian penulis memberikan pendalaman pada "Aksi Komunikatif" untuk menilai kualitas kolaborasi tersebut di Pasar Among Tani.

5. Analisis terhadap (Ursić et al., 2024): Penelitian ini membahas bagaimana pasar hijau meningkatkan konsep keberlanjutan ruang publik. Penulis merelevansikan ini dengan pilar "Rutinitas Perawatan" dan "Investasi Ruang Publik". Perbedaannya, penulis menekankan bahwa keberlanjutan hijau tidak akan tercapai tanpa adanya kesepahaman dialogis antara pengelola sampah/lingkungan dengan komunitas pedagang.
6. Analisis terhadap (Vaivadaitė & Navickienė, 2024): Melalui tinjauan literatur sistematis, studi ini membedah potensi pasar makanan di kota kontemporer. Penulis menggunakan studi ini sebagai rujukan mengenai tren pasar modern. Perbedaannya, penelitian penulis melakukan studi kasus lapangan secara langsung untuk menguji apakah potensi tersebut sudah teraktualisasi di Pasar Among Tani melalui tata kelola yang partisipatif.
7. Analisis terhadap (Watson, 2025): Ini merupakan referensi kunci mengenai Hidden Labour (kerja tersembunyi) pedagang. Penulis mengadopsi konsep ini sebagai kebaruan utama untuk membuktikan bahwa di balik manajemen formal UPT Pasar, terdapat praktik-praktik sosial dan kerja pedagang yang menjadi tulang punggung keberlangsungan pasar namun sering kali tidak terlihat secara administratif.
8. Analisis terhadap (Li et al., 2022): Studi ini menganalisis dimensi publisitas ruang publik melalui kenyamanan dan inklusivitas. Penulis menggunakan indikator ini untuk mengevaluasi pilar "Investasi Ruang Publik". Perbedaannya, penelitian penulis mengaitkan inklusivitas tersebut dengan akses pedagang dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar kenyamanan fisik pengunjung.
9. Analisis terhadap (Jaya et al., 2025): Penelitian ini menekankan mekanisme tata kelola partisipatif sebagai proses sosial. Relevansinya terletak pada cara memandang tata kelola sebagai interaksi sosial. Penulis mempertajam analisis ini dengan menggunakan teori Habermas untuk mengungkap fenomena "Kolonisasi Dunia-Kehidupan" yang terjadi dalam proses partisipasi tersebut.

10. Analisis terhadap (Tradicional, 2023): Studi ini membedah habitabilitas fisik-spasial dan psikososial pasar tradisional. Penulis menggunakan rujukan ini untuk memperkuat pilar "Regulasi Penggunaan". Perbedaannya, penelitian penulis memfokuskan pada bagaimana aturan penggunaan ruang (zonasi) berdampak pada psikososial dan keberlangsungan komunikasi antar-pedagang. Berdasarkan analisis terhadap sepuluh penelitian di atas, letak kebaruan (novelty) penelitian ini adalah pada integrasi pilar Local Social Governance (KKNG) dengan Teori Aksi Komunikatif Habermas untuk mengungkap sisi Hidden Labour yang selama ini terabaikan dalam studi manajemen pasar. Ringkasan dari relevansi penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Relevansi Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Hasil/Temuan	Relevansi
1.	<i>Governance of traditional markets and rural-urban food systems in sub-Saharan Africa</i> (Davies et al., 2022)	Keberhasilan pasar tradisional bergantung pada struktur tata kelola yang diterapkan. Model pengelolaan ideal harus mengadopsi prinsip partisipatif-demokratis, melibatkan pemerintah, komite pasar, dan protokol resolusi konflik yang jelas.	Persamaan: Sama-sama menyoroti pentingnya tata kelola ( <i>governance</i> ) dan mekanisme partisipatif dalam pengelolaan pasar tradisional. Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada sistem pangan di Afrika Sub-Sahara; penelitian Anda berfokus pada <i>Local Social Governance</i> (LSG) di konteks pasar tradisional Indonesia.
2.	<i>Citizen Management Public Spaces: New Ways of Public-Communitarian Management</i> (Fernando et al., 2021)	Menggagas model <i>public-community management</i> yang menegaskan perlunya pemerintah membuka ruang lebih besar bagi komunitas dalam pengelolaan fasilitas publik. Tujuannya	Persamaan: Mendukung argumen sentral bahwa pengelolaan ruang publik harus berbasis komunitas/warga negara, yang selaras dengan prinsip LSG. Perbedaan: Penelitian

		adalah melindungi <i>dunia kehidupan</i> komunitas dari birokrasi yang berlebihan.	ini bersifat konseptual dan umum tentang ruang publik; penelitian Anda menguji implementasi empiris model tersebut di konteks pasar tradisional.
3.	<i>Traditional market sustainability in the perspective of market managers</i> (Utari et al., 2021)	Keberlanjutan pasar tradisional sangat ditentukan oleh strategi bisnis (untuk daya saing) dan peran manajer pasar (otoritas formal) dalam manajemen yang profesional dan efektif.	Persamaan: Sama-sama membahas manajemen dan upaya keberlanjutan pasar tradisional sebagai objek studi. Perbedaan: Studi ini menekankan pada perspektif manajer pasar (otoritas formal); penelitian Anda fokus pada kolaborasi multipihak (LSG) sebagai fondasi manajerial.
4.	<i>Local Governance as a Collaborative System: Formal and Informal Institutions Interaction</i> (Ogunnubi, 2022)	Tata kelola lokal adalah sistem kolaboratif yang melibatkan institusi formal (pemerintah daerah) dan informal (masyarakat sipil). Tata kelola harus berfungsi sebagai mekanisme mediasi untuk partisipasi warga dan penyelesaian konflik.	Persamaan: Memperkuat landasan teoritis bahwa <i>governance</i> di tingkat lokal adalah proses kolaboratif dan sosial yang melibatkan aktor formal dan informal, inti dari konsep LSG. Perbedaan: Penelitian ini menganalisis tata kelola lokal secara umum; penelitian Anda mengujinya dalam konteks ruang pasar yang spesifik.
5.	Penjaga Ruang Publik Perkotaan: Bagaimana Pasar Hijau Meningkatkan Konsep	Pasar adalah elemen struktural penting dalam pembangunan perkotaan dan berperan sebagai pendorong keberlanjutan	Persamaan: Memperkuat peran pasar sebagai Ruang Publik yang vital bagi pengembangan

	Keberlanjutan (Ursić et al., 2024)	serta inklusi sosial. Pasar dapat menjadi sentra bagi identitas dan regenerasi kota.	kota, yang menjadi konteks latar belakang penelitian Anda. Perbedaan: Studi ini fokus pada aspek pasar hijau dan keberlanjutan lingkungan; penelitian Anda fokus pada LSG sebagai model tata kelola sosial.
6.	<i>The Potential of Food Markets in the Contemporary City: A Systematic Literature Review</i> (Vaivadaitė & Navickienė, 2024)	Pasar makanan berfungsi sebagai simpul sosial ( <i>social node</i> ) yang memiliki potensi signifikan dalam mempertahankan dinamika komunitas dan menjadi tempat sosialisasi di tengah kota kontemporer.	Persamaan: Mendukung perspektif bahwa pasar tradisional adalah simpul sosial dan ruang sosialisasi, yang relevan dengan fungsi optimalisasi pasar dalam LSG Anda. Perbedaan: Studi ini merupakan tinjauan literatur yang bersifat luas; penelitian Anda adalah studi kasus empiris.
7.	<i>Making the invisible visible in city spaces: The hidden labour practices of market traders</i> (Watson, 2025)	Pengelolaan pasar harus menyadari dan mengakui kerja keras tersembunyi ( <i>hidden labour</i> ) pedagang sebagai elemen krusial yang menopang fungsi pasar.	Persamaan: Mendalami dimensi sosial dan pengakuan terhadap pedagang, yang merupakan elemen penting dari prinsip kesetaraan dan Aksi Komunikatif dalam LSG. Perbedaan: Fokus pada isu spesifik <i>hidden labour</i> ; penelitian Anda menggunakan isu ini sebagai salah satu indikator keberhasilan LSG secara umum.

8.	Analisis Dimensi Publisitas Ruang Publik: Kenyamanan, Aksesibilitas, dan Inklusivitas (Li et al., 2022)	Kualitas ruang publik harus dievaluasi berdasarkan dimensi publisitas, meliputi kenyamanan, aksesibilitas, pengelolaan, dan keterbukaan (inklusivitas). Kualitas ini tidak hanya dinilai dari aspek fisik, tetapi juga dinamika sosial.	Persamaan: Menyediakan kerangka dimensi untuk mengevaluasi kualitas pasar sebagai Ruang Publik (relevan dengan tujuan penelitian Anda). Perbedaan: Studi ini adalah tinjauan dimensi kualitatif; penelitian Anda berfokus pada bagaimana LSG berfungsi untuk mengelola dan mengoptimalkan dimensi-dimensi tersebut.
9.	Mekanisme Tata Kelola Partisipatif sebagai Proses Sosial dalam Komunitas Lokal (Jaya et al., 2025)	<i>Governance</i> diinterpretasikan sebagai proses sosial yang dibentuk melalui negosiasi, koordinasi, dan interaksi antar-aktor lokal. Kunci keberhasilan <i>governance</i> adalah kapasitas aktor lokal membangun kolaborasi dan partisipasi warga.	Persamaan: Mendefinisikan <i>governance</i> dari sudut pandang proses sosial yang membutuhkan kolaborasi, yang merupakan inti dari landasan teoretis LSG Anda. Perbedaan: Fokus pada mekanisme umum kolaborasi di tingkat lokal; penelitian Anda menerapkan mekanisme ini untuk menganalisis masalah riil pengelolaan Pasar.
10.	<i>Traditional Market: Physical - Spatial and Psychosocial Habitability</i> (Tradisional, 2023)	Keberlanjutan pasar tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik ( <i>physical-spatial</i> ) tetapi juga oleh keterhunian psikososial ( <i>psychosocial</i> )	Persamaan: Sama-sama mengakui bahwa pasar adalah ruang dengan dimensi sosial-psikologis yang perlu dikelola. Perbedaan:

		<i>habitability</i> ), yang meliputi rasa aman, kepercayaan, dan kohesi komunitas pedagang.	Studi ini lebih berfokus pada aspek keterhunian fisik dan mental; penelitian Anda berfokus pada mekanisme tata kelola (LSG) yang menghasilkan keterhunian tersebut.
--	--	---	---

## 2.2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.2.1 Tata Kelola Sosial Lokal Sebagai Kajian Sosiologi

Studi mengenai dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa persoalan sosial di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, nilai budaya, dan relasi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam tata kelola menekankan bahwa *governance* bukan sekadar perangkat aturan atau struktur administratif, tetapi merupakan proses sosial yang dibentuk melalui interaksi aktor-aktor lokal, jaringan sosial, norma, serta distribusi kekuasaan dalam komunitas (Jaya et al., 2025). Dengan demikian, tata kelola dipahami sebagai praktik yang berlangsung melalui proses negosiasi, koordinasi, dan pembentukan kesepakatan bersama yang merefleksikan karakter sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan *governance* sangat bergantung pada kapasitas aktor lokal membangun kolaborasi dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat, keberadaan organisasi lokal, sektor informal, serta kemitraan antara pemerintah dan komunitas menjadi komponen penting yang menentukan efektivitas tata kelola (Jaya et al., 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa tata kelola sosial

(*social governance*) berada dalam ruang lingkup kajian sosiologi pemerintahan, sosiologi komunitas, dan sosiologi perkotaan karena mempelajari praktik sosial dalam pengelolaan urusan publik.

Relevansi pandangan tersebut diperkuat oleh temuan (Ogunnubi, 2022), yang menunjukkan bahwa tata kelola lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai representasi pemerintah daerah, melainkan sebagai sistem kolaboratif yang melibatkan institusi formal maupun informal, termasuk masyarakat sipil dan sektor privat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tata kelola lokal merupakan seperangkat mekanisme yang memungkinkan warga menyampaikan kebutuhan, menengahi perbedaan, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi layanan publik. Dalam hal ini, tata kelola lokal berkembang sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh kemampuan aktor untuk berkoordinasi, berbagi kewenangan, dan membangun hubungan yang akuntabel.

Kedua sumber tersebut menunjukkan keterkaitan langsung dengan konteks *local social governance* pada pengelolaan pasar tradisional sebagai ruang publik. Pengelolaan pasar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, melainkan juga oleh pola interaksi antara pedagang, pengelola pasar, pengunjung, BUMDes, komunitas lokal, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pasar tradisional merupakan ruang sosial di mana *governance* berlangsung melalui negosiasi, kerja sama, komunikasi informal, dan pembentukan struktur sosial yang diakui bersama. Sejalan dengan itu, baik (Jaya et al., 2025) maupun (Ogunnubi, 2022) menekankan pentingnya modal sosial, partisipasi komunitas, dan kemitraan

multipihak dalam memastikan tata kelola publik berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa tata kelola sosial lokal merupakan salah satu bidang penting dalam kajian sosiologi karena mengkaji hubungan antara aktor, struktur sosial, dan proses pengambilan keputusan dalam konteks ruang publik. Kerangka ini menjadi relevan untuk penelitian mengenai kontribusi pengelolaan berbasis *local social governance* di Pasar Induk Among Tani, di mana praktik *governance* dapat dilihat dari bagaimana aktor-aktor lokal membangun relasi, mengelola konflik, berbagi peran, serta menjaga keberlanjutan fungsi pasar sebagai area publik, sosial, dan ekonomi.

### **2.2.2 Pasar Tradisional Sebagai Ruang Publik dan Dinamika Sosial**

Pasar tradisional memiliki peran multidimensi yang melampaui fungsi ekonomi semata, menjadikannya ruang publik yang vital bagi interaksi sosial dan dinamika komunitas. Dalam konteks perkotaan, pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi barang dan jasa, tetapi juga sebagai simpul sosial *social node* yang merefleksikan dan mempertahankan dinamika komunitas, pertukaran budaya, serta ekspresi identitas lokal. Berdasarkan fungsi krusial ini, pasar secara inheren merupakan pusat sosialisasi yang memungkinkan masyarakat berkumpul, membangun relasi, dan bertukar informasi. Hal ini semakin diperkuat dengan temuan (Jae-Jang & Sun-Choung, 2020) melakukan analisis nilai yang dirasakan pelanggan di pasar. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa nilai yang mendorong pelanggan untuk kembali dan memiliki niat berperilaku positif *behavioral intention* tidak hanya berbasis pada nilai utilitas dan ekonomi, tetapi juga mencakup nilai emosional dan nilai sosial (Jae-Jang & Sun-Choung,

2020). Implikasinya bagi penelitian di Pasar Among Tani adalah bahwa tata kelola berbasis *local social governance* harus mampu melampaui orientasi transaksional dan secara aktif menciptakan lingkungan yang menumbuhkan nilai-nilai sosial dan emosional guna membentuk sikap dan norma positif pengguna.

Mekanisme pasar sebagai ruang sosialisasi mendapatkan penekanan metodologis melalui studi yang dilakukan oleh (Rana et al., 2020). Mereka menggaris bawahi bahwa ruang publik seperti pasar tradisional sangat esensial untuk sosialisasi, memfasilitasi pertemuan orang-orang untuk berbelanja, berekreasi, dan membangun hubungan sosial (Rana et al., 2020). Studi tersebut secara spesifik menemukan bahwa efektivitas sosialisasi dipengaruhi secara positif oleh faktor-faktor tertentu, yakni perilaku, fungsi, paparan visual, serta akses dan komunikasi (Rana et al., 2020). Sehubungan dengan penelitian di Kota Batu, temuan ini memiliki relevansi substansial. Permasalahan mengenai kios kosong dan menurunnya intensitas interaksi sosial yang teridentifikasi di Pasar Among Tani dapat diartikan sebagai kegagalan dalam mengoptimalkan dimensi fungsi dan akses pasar. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menguji bagaimana model *local social governance* dapat memperbaiki koordinasi dan intervensi agar faktor-faktor penentu sosialisasi ini dapat berfungsi kembali secara optimal.

Di samping mekanisme sosialisasi, pasar tradisional memiliki peran strategis dan dinamika unik yang harus diperhatikan dalam tata kelola, yaitu:

1. Peran Strategis dalam Inklusi Sosial dan Pengakuan Kerja

Peran ini menegaskan posisi pasar sebagai ruang sosial yang mendukung keragaman dan keberlanjutan komunitas, mencakup:

- a) Mendukung Inklusi Sosial dan Mediasi Perbedaan: Pasar adalah ruang publik yang penting karena mendorong inklusi sosial dan berfungsi sebagai arena untuk menengahi perbedaan di antara berbagai kelompok masyarakat (Sophie, 2009). Kontras Substansial dengan Pasar Modern: Pertemuan sosial di pasar menawarkan kontras yang substansial dengan *shopping malls* modern, karena pasar memberikan peluang yang lebih besar untuk mengakomodasi kelompok terpinggirkan (Sophie, 2009).
- b) Pengakuan *Hidden Labour*: Pasar merupakan penyedia mata pencaharian yang vital. Pengelolaan harus menyoroti praktik kerja sehari-hari pedagang yang sering tersembunyi (*hidden labour*), seperti kerja malam dan aktivitas fisik yang berat, sebagai elemen krusial yang menghidupkan pasar (Watson, 2025).

## 2. Dinamika Sosio-Spasial dan Tantangan Devaluasi

Secara tata ruang, pasar memiliki dinamika unik yang sekaligus menjadi tantangan manajerial:

- a) Ruang Hibrida Aktivitas: Pasar menampilkan dinamika unik sebagai ruang hibrida yang memadukan aktivitas yang sudah terencana (terstruktur) dan aktivitas yang terjadi secara spontan (Tradisional, 2023).
- b) Tantangan Devaluasi: Pasar tidak luput dari tantangan devaluasi (penurunan nilai) yang diakibatkan oleh kondisi fisik dan sosial yang buruk.

- c) Ancaman Hilangnya *Sense of Appropriation*: Perubahan struktur sosio-spasial di pasar dapat memengaruhi persepsi pengguna dan menyebabkan kemerosotan dalam rasa kepemilikan (*sense of appropriation*) atau hilangnya identitas pasar (Tradisional, 2023)
- d) Kebutuhan Habitabilitas: Oleh karena itu, tata kelola pasar yang efektif tidak hanya harus berfokus pada fungsionalitas, tetapi juga pada aspek habitabilitas fisik dan psikosial.

Dinamika dan peran ganda ini menegaskan bahwa pengelolaan berbasis *Local Social Governance (LSG)* harus mengkaji bagaimana mekanisme kolaboratif dapat menjamin pasar berfungsi sebagai ruang publik yang inklusif, mengakui peran kritis pedagang, dan pada akhirnya memastikan keberlanjutan fungsi pasar.

### **2.2.3 Empat Dimensi Kunci dalam Manajemen Ruang Publik**

Pengelolaan ruang publik adalah tugas manajemen yang sangat penting agar ruang tersebut dapat berfungsi optimal, terbuka untuk semua (inklusif), dan kuat menghadapi laju perubahan kota. Proses pengelolaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan perencanaan strategis, koordinasi, dan pemahaman mendalam terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat. Secara definitif, (de Magalhães & Carmona, 2009) menjelaskan pengelolaan ruang publik sebagai cara kota diatur, di mana berbagai kebutuhan publik yang sering bertentangan diatur melalui serangkaian praktik. Menurut mereka, pengelolaan ruang publik yang efektif didukung oleh empat pilar (dimensi) utama yang saling berkaitan.

Keempat dimensi fundamental yang diusulkan oleh (de Magalhães & Carmona, 2009) tersebut adalah:

- a. Koordinasi Intervensi: Fokusnya adalah pada perencanaan strategis dan penyelarasan semua program dan proyek yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan semua kebijakan dan kegiatan pengelolaan berjalan selaras dan terpadu, bukan terpisah-pisah.
- b. Regulasi Penggunaan: Berkaitan dengan pembuatan aturan yang jelas tentang bagaimana ruang dapat dimanfaatkan, serta menyediakan mekanisme efektif untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul di antara berbagai pengguna ruang.
- c. Rutinitas Perawatan: Menekankan pentingnya pemeliharaan rutin dan berkelanjutan. Ini mencakup penetapan jadwal perawatan agar ruang publik selalu bersih, aman, dan berfungsi dengan baik.
- d. Investasi di Ruang Publik: Meliputi alokasi dana, tenaga, dan material untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas ruang, bukan hanya sekadar membiayai operasi dasar.

Mengingat Pasar Among Tani merupakan ruang publik, keempat pilar *Magalhães & Carmona* ini sangat relevan. Namun, pengelolaan ruang publik saat ini juga dituntut untuk memperhatikan dimensi kualitatif, seperti Dimensi Publisitas. (Miguel et al., 2020) menjelaskan bahwa perkembangan kota telah mengubah struktur sosial dan cara orang memandang ruang publik tradisional. Dalam konteks ini, (Li et al., 2022) meninjau empat dimensi publisitas:

kenyamanan, aksesibilitas, pengelolaan, dan keterbukaan (inklusivitas). Hal ini menegaskan bahwa kualitas ruang publik tidak hanya dinilai dari tampilan fisik, tetapi juga dari dinamika sosial dan kepentingan banyak pihak yang terlibat di dalamnya.

Dimensi-dimensi tersebut telah dirumuskan, namun pengelolaan ruang publik, terutama di pasar tradisional, menghadapi tantangan besar. Tantangan ini meluas, baik pada aspek fisik-sosial maupun operasional. Pasar tradisional rentan terhadap penurunan kualitas akibat kondisi fisik yang buruk dan masalah sosial. Secara spesifik, (Fernando et al., 2021) menjelaskan bahwa perubahan dalam tata ruang dan sosial di pasar dapat memengaruhi pandangan pengguna, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa kepemilikan atau bahkan menghilangkan ciri khas pasar itu sendiri.

Tantangan operasional juga mencakup pengakuan terhadap kerja keras harian pedagang yang sering tidak terlihat (*hidden labour*). Studi pada (Watson, 2025) menekankan bahwa pengelola harus mengakui peran penting dari aktivitas seperti kerja malam dan aktivitas fisik berat yang dilakukan pedagang, yang merupakan elemen krusial agar pasar dapat berfungsi.

Guna mengatasi tantangan dan memenuhi tuntutan kualitas, pengelolaan ruang publik modern harus berfokus pada keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi jangka panjang. Ini berarti pengelola harus mampu merespons situasi spesifik pasar, mengelola kinerja, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tantangan di masa depan juga melibatkan integrasi teknologi (Interaksi Fisik-Virtual) dan isu Keamanan serta tata kelola. Model tata kelola yang ideal

harus menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan upaya menjaga keterbukaan dan inklusivitas, agar lingkungan tidak menjadi terlalu kaku dan menghambat interaksi sosial.

Pasar Among Tani harus dianalisis secara menyeluruh (holistik) dengan mengadopsi model tata kelola sosial lokal (*local social governance*). Model ini sangat penting untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan keempat dimensi utama dan dimensi pelengkap. Melalui pola kerja sama berbagai pihak (kolaborasi multipihak), model ini bertujuan menciptakan ruang publik pasar yang dinamis dan tangguh, menjadikannya tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga aset sosial bagi masyarakat.

## **2.3 KERANGKA TEORI**

### **2.3.1 Teori Local Social Governance**

#### **A). Fondasi Struktural: Kapasitas dan Eksistensi Governance**

Kerangka teoritis terpadu yang digunakan pada penelitian ini, penting untuk memulai dengan definisi struktural yang mendasari analisis ini, yaitu *Governance*. Menurut *Francis Fukuyama* dalam artikelnya “*What Is Governance?*”, *governance* dapat diparafrasekan sebagai kapasitas aktual otoritas pemerintahan—yang mencakup badan eksekutif dan birokrasi—untuk merumuskan dan menegakkan aturan, serta menyediakan berbagai layanan publik secara efektif, terlepas dari bentuk politiknya (Fukuyama, 2013). Fokus utama Fukuyama terletak pada dimensi eksekusi dan implementasi, bukan pada tujuan normatif. Dengan demikian, *governance* dijadikan tolok ukur kinerja manajerial yang diperlukan untuk menjalankan mandat kebijakan, yang sekaligus menjadi fondasi struktural sebelum beranjak pada dimensi sosial.

Pemahaman mengenai kualitas *governance* struktural ini menjadi sangat relevan karena penelitian ini menggunakan kerangka teoritis terpadu yang memandang *local social governance* (LSG) di Pasar Among Tani sebagai perpaduan antara persyaratan struktural negara dan tujuan sosial. LSG, yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi sosial, hanya dapat berjalan efektif jika fondasi manajemen dan eksekutif (otoritas formal) telah memenuhi prasyarat dasar *governance*. Francis Fukuyama menyediakan kerangka untuk menganalisis kesiapan fondasi hierarkis yang harus dipenuhi oleh otoritas formal (Dinas Koperasi/Pengelola) agar sistem tata kelola lokal dapat berjalan, yang menekankan bahwa keberhasilan LSG sangat bergantung pada kekuatan pilar inti berikut:

1. Negara (*The State*): Kapasitas Kelembagaan. Pilar ini mengukur kekuatan dan kemampuan nyata pengelola pasar. LSG hanya efektif jika pengelola memiliki kapasitas memadai untuk menyediakan layanan publik (pemeliharaan, investasi) dan menegakkan aturan secara konsisten.
2. Supremasi Hukum (*The Rule of Law*): Pilar ini menjamin keadilan dan prediktabilitas dalam penerapan aturan pasar. Supremasi hukum adalah syarat mutlak untuk membangun kepercayaan di antara pedagang.
3. Akuntabilitas (*Accountability*): Pilar ini menuntut pengelola bertanggung jawab atas kekuasaannya. Akuntabilitas menjadi kunci bagi transparansi dan partisipasi. (Brown, 2016).

## B). Transformasi Menuju Local Social Governance (LSG)

Ketiga pilar Fukuyama di atas menyediakan lingkungan yang stabil, namun konsep *local social governance* (LSG) menempatkan tata kelola bukan sebagai bentuk dominasi kekuasaan tunggal dari otoritas negara, melainkan sebagai sebuah jejaring kerja sama yang mengedepankan kemandirian dan kesetaraan relasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik secara lokal.

Landasan pengukuran yang lebih konkret dalam penelitian ini dilakukan dengan mengoperasionalkan konsep *local social governance* (LSG) di Pasar Among Tani melalui empat pilar prinsip tata kelola yang diadaptasi dari Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola dalam (Wijaya, 2023). Pilar-pilar ini berfungsi sebagai parameter untuk menganalisis sejauh mana sistem manajerial pasar mampu mengakomodasi kebutuhan dunia-kehidupan (*lifeworld*) pedagang tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas formal, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Empat Pilar dalam Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola**

Pilar	Indikator Analisis dalam Penelitian
Perilaku Beretika	Adanya nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam setiap interaksi serta proses pengambilan keputusan antar aktor (Pemerintah-Pedagang).
Transparansi	Ketersediaan informasi kebijakan yang terbuka, kemudahan akses data bagi pedagang, serta pengakuan terhadap legalitas asosiasi pedagang.

Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan tanggung jawab pengelola (UPT) maupun pihak ketiga dalam menjamin kualitas pelayanan publik (sampah dan keamanan).
Keberlanjutan	Komitmen sistematis untuk menjaga eksistensi pasar melalui penguatan modal sosial (keguyuban) dan stabilitas ketahanan ekonomi pedagang.

*Sumber : KKNG dalam (Wijaya, 2023)*

Keempat indikator di atas memungkinkan peneliti untuk memetakan secara kritis letak distorsi komunikasi maupun keberhasilan kolaborasi yang terjadi dalam ekosistem Pasar Among Tani. Penjabaran parameter ini sekaligus menjadi jembatan menuju kerangka berpikir penelitian yang memposisikan tindakan komunikatif sebagai instrumen kunci dalam mencapai konsensus tata kelola yang demokratis.

### **C). Sintesis: LSG sebagai Ruang Intera**

Sinergi antara kapasitas struktural Fukuyama dengan empat pilar operasional KKNG di atas memungkinkan peneliti untuk memetakan secara kritis di mana letak distorsi maupun keberhasilan kolaborasi dalam ekosistem Pasar Among Tani.

Pilar-pilar ini bukan sekadar indikator statis, melainkan sebuah ruang yang dinamis. Penjabaran parameter ini sekaligus menjadi jembatan menuju analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana para aktor di dalam pasar saling berinteraksi. Keberhasilan pilar seperti "Perilaku Beretika" dan "Transparansi" sangat bergantung pada kualitas dialog yang terbangun. Oleh karena itu, kerangka LSG ini memerlukan instrumen kunci berupa tindakan komunikatif guna

mencapai konsensus tata kelola yang demokratis, yang akan dibahas secara mendalam pada sub-bab berikutnya.

### 2.3.2 Teori Aksi Komunikatif

Kerangka analisis utama dalam penelitian ini adalah Teori Aksi Komunikasi (*The Theory of Communicative Action*) yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Secara fundamental, aksi komunikatif (*Communicative Action*) adalah bentuk interaksi sosial yang berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama, dan bukan pada keberhasilan strategis atau egoistik individu. Aksi komunikatif memiliki landasan filosofis pada Etika Diskursus, di mana (Suseno, 2016) dalam Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, menjelaskan bahwa teori ini mencari legitimasi norma atau keputusan melalui diskursus praktis yang ideal. Dalam diskursus tersebut, persetujuan hanya dapat dicapai melalui kekuatan argumen yang lebih baik, menolak pengaruh dari paksaan kekuasaan struktural.

Teori Aksi Komunikasi sangat relevan karena berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa interaksi antar aktor (pedagang dan pengelola) dalam tata kelola (*governance*) Pasar Among Tani berjalan secara demokratis dan bebas dari rekayasa. Jaminan demokratis ini muncul dari syarat mutlak yang disebut situasi wicara ideal (*Ideale Sprechsituation*). Situasi ini mengharuskan setiap orang yang terlibat dalam diskusi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berbicara, bertanya, dan menolak tanpa ada rasa takut atau tekanan. Keputusan yang dihasilkan dari aksi komunikatif hanya sah jika memenuhi tiga syarat utama yang dapat dibuktikan dan diuji oleh semua pihak:

1. Kebenaran (fakta atau informasi yang disampaikan harus benar).

2. Keputusan (aturan atau keputusan harus sesuai dengan norma yang disepakati),
3. Ketulusan (setiap aktor harus jujur dan tidak memiliki motif tersembunyi).

Jika salah satu syarat tersebut gagal, maka proses tersebut tidak dianggap sebagai Aksi Komunikatif, melainkan Tindakan Strategis yang tidak sah.

Prinsip aksi komunikasi ini menjadi prasyarat mutlak bagi fungsi ideal ruang publik, yang dalam konteks ini adalah Pasar Among Tani. Supaya ruang publik dapat menjalankan fungsi pembentukan opini dan kontrol kritis (Seidman, 2005) serta bebas dari dominasi (Danardono & Cahyadi, 2009), ia harus disokong oleh aksi komunikasi yang dipandu oleh rasio komunikatif. Implementasi LSG (*local social governance*) di Pasar Among Tani kemudian dipahami sebagai upaya nyata dalam mengaplikasikan aksi komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif (Jacobson, 2020). Hal ini sangat krusial untuk mensejahterakan pedagang dari pengambilalihan (kolonisasi) oleh sistem (seperti birokrasi kaku atau kepentingan ekonomi yang kuat). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengukur apakah koordinasi dan penyelesaian konflik dalam LSG benar-benar dicapai melalui kesepakatan bebas (konsensus) yang didasari aksi komunikasi, sebagai bukti bahwa tata kelola pasar berjalan secara adil, transparan, dan demokratis.